

**PERANAN PEMBELAJARAN KONSEP DEMOKRASI PADA MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENINGKATKAN
SIKAP DEMOKRATIS SISWA
(Studi Deskriptif Analitis di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto)**

Elly Hasan Sadeli, Ratna Kartika Wati

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

Civic education aims to build the understanding of citizen in doing their right and compulsory as the member of people in every single past of life. Beside that, the civic education also try to develop the though of citizen, that is the citizen who are able to show their maturity of attitude, act, activity, speech and thought. In this research, the writers apply descriptive method combined with qualitative approach. The technique of data collecting used in this research are by doing interview, observation, documentation study and literary study. According to the research result, the writers have gained some conclusions, they are : 1) During the study of civic education, teachers are often giving some chances to students show their argumentation about the problems or issue of citizenship; The issues of citizenship meant above possibly come from the students' social environment or the environment in general. The aim of giving chance to students in showing their arguments is to develop the athmosphere of democracy; 2) the obstacles during the learning process of democracy concept are the limited knowledge and information of democratic attitude in giving/showing argumentation that students have; 3) By giving learning process about democracy concept, the students are treated to be accustomed with the democratic attitude in responding every problem raises in the school, citizen or even citizenship issues in the scope of national.

Keywords : *Civic Education and Democracy*

A. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk mencapai dua sasaran pokok yang seimbang, yaitu *pertama* meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang etika, moral, dan asas-asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. *Kedua*, membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kedua sasaran itu hendaknya dapat dicapai secara serentak agar peserta didik tidak hanya sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan belaka, tetapi yang terpenting adalah agar mereka memiliki kemampuan berbuat sesuatu dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang telah dikuasainya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dinyatakan dalam pilar-pilar pembelajaran dari UNESCO, selain terjadi *learning to know* (pembelajaran untuk tahu), juga harus terjadi *learning to do* (pembelajaran untuk berbuat), dan bahkan

dituntut sampai pada *learning to be* (pembelajaran untuk membangun jati diri yang kokoh), dan *learning to live together* (pembelajaran untuk hidup bersama secara harmonis). Artinya, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diikuti dan dilaksanakan oleh siswa dengan suasana yang menyenangkan dan penuh makna (*enjoyfull and meaningful*).

Pada kenyataannya, di sekolah-sekolah tertentu kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih belum sesuai dengan harapan dan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal itu didukung oleh sejumlah kajian empirik di lapangan tentang keberadaan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yakni masih adanya kesan yang ditangkap oleh siswa bahwa mata pelajaran tersebut tidak menarik dan membosankan.

Secara bahasa, istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang berasal dari istilah "*Civic Education*" oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007:4), mengemukakan bahwa *Citizenship education or civic education* didefinisikan sebagai berikut:

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.

Berpijak dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya peran sekolah, pengajaran dan pembelajaran, dalam proses penyiapan warganegara tersebut.

Sementara Branson (1999:4) mengidentifikasi ada tiga komponen penting yang harus dicapai oleh siswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (watak-watak kewarganegaraan). Komponen pertama, *civic knowledge* "berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara" (Bransons 1999:8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Kedua, *Civic Skills* meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan

kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi bila mengetahui ada kejahatan.

Ketiga, *Civic Disposition* (Watak-watak kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.

Agar dapat mencapai ketiga kompetensi tersebut diperlukan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif, sehingga kompetensi-kompetensi tersebut bisa tercapai. Dalam demokrasi konstitusional, "*civic education* yang efektif adalah suatu keharusan" (Barber, 1992), karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semua itu memerlukan kemampuan yang memadai.

Selanjutnya, Branson (Winataputra dan Budimansyah 2007:196-198) memberikan contoh indikator ketercapaian kompetensi kewarganegaraan siswa dalam hal pengetahuan, ketrampilan dan watak kewarganegaraan sebagai mana diuraikan berikut ini. Pertama, komponen *civic knowledge* harus diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang secara terus-menerus harus diajukan sebagai sumber belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Lima pertanyaan yang dimaksud adalah: (1) apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?; (2) apa dasar-dasar sistem politik Indonesia?; (3) bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia?; (4) bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia?; dan (5) apa peran warganegara dalam demokrasi Indonesia?.

Kedua, komponen *civic skills* memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual meliputi: berpikir kritis, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat; sedangkan kecakapan partisipatoris mencakup: berinteraksi, memonitor, dan mempengaruhi.

Ketiga, komponen *civic disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Secara singkat karakter publik dan privat itu adalah (a) menjadi anggota masyarakat yang independen, (b) memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, (c) menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu, (d) berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana; (e) mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Kedua karakter tersebut memerlukan dukungan kompetensi/karakteristik yang harus nampak pada diri warga negara. Cogan (1998:115) mengkonstruksi karakteristik yang harus dimiliki warga negara sebagai berikut:

1. *the ability to look at and approach problems as a member of a global society* (kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global)
2. *the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society* (kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat)
3. *the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences* (kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya)
4. *the capacity to think in a critical and systemic way* (kemampuan berpikir kritis dan sistematis)
5. *the willingness to resolve conflict and in a non-violent manner* (kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan)
6. *the willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment* (kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan)
7. *the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, rights of women, ethnic minorities, etc), and* (memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb))
8. *the willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels* (kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional).

Tuntutan pengembangan karakteristik warga negara di atas menurut Cogan (1998:117) harus dikonstruksi dalam kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang multidimensional (*multidimensional citizenship*), yang ia gambarkan dalam empat dimensi yang saling berinterelasi, yaitu *the personal, social, spatial and temporal dimension*. Keempat dimensi ini akan melahirkan atribut kewarganegaraan yang mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-masing, yakni: (1) *a sense of identity*; (2) *the enjoyment of certain rights*; (3) *the fulfilment of corresponding obligations*; (4) *a degree of interest and involvement in public affairs*; and (5) *an acceptance of basic societal values*. Bagi Indonesia, karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Dalam konteks ini juga, maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian integral dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan pada umumnya memiliki peran penting karena "mata pelajaran ini secara etimologis pada awalnya dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* antara lain mengembangkan

nilai demokrasi dan kesadaran berdemokrasi untuk menegakkan negara hukum” (Al Muchtar, 2004:19). Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sangatlah penting, yakni untuk membekali siswa pengetahuan dasar nilai-nilai demokrasi sehingga dalam diri siswa tumbuh kesadaran berdemokrasi yang diperlukan guna menegakkan negara hukum.

Salah satu tuntutan dalam peningkatan sumber daya manusia itu adalah peningkatan sikap dan perilaku warga negara yang demokratis, karena salah satu cita-cita kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah terwujudnya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pendidikan demokrasi yang baik. Winataputra, (2002:119) menyatakan bahwa "ethos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami". Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup konsep demokrasi sangat penting artinya dalam upaya pembentukan warga negara yang demokratis.

Pendidikan merupakan instrumen pengembangan demokrasi yang sangat penting, baik aspek konseptual maupun penerapannya. Tujuan pendidikan demokrasi menurut Manan (2003:146) adalah "menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, pengetahuan mengenai mekanisme demokrasi seperti *democratic responsibility, fairness, transparency, peaceful, moderate*, dan lain-lain". Tujuan pendidikan demokrasi ini sangat penting untuk dicermati oleh para pendidik agar tidak terjebak pada pemberian pengetahuan demokrasi semata. Oleh karena itu, dalam pendidikan demokrasi selain pendidikan konseptual harus pula diikuti dengan latihan berdemokrasi. Salah satu mata pelajaran yang bertanggung jawab untuk pendidikan demokrasi itu adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena Pendidikan Kewarganegaraan ini dalam sejarahnya "mengambil bagian dari ilmu politik yaitu demokrasi politik" (Somantri; 2001 : 274).

Agar pencapaian kompetensi kewarganegaraan siswa dapat tercapai secara optimal, maka diperlukan peran yang optimal dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya konsep demokrasi selama proses pembelajaran didalam kelas maupun diluar kelas.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peranan pembelajaran konsep demokrasi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan sikap demokratis siswa. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji tentang : 1) Pembelajaran konsep demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 2) Kendala-kendala yang dialami dalam pembelajaran konsep demokrasi, 3) Sikap demokratis siswa dibangun dalam proses pembelajaran konsep demokrasi.

B. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (1998:15) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut;

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyses words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah.

Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2003:5). Menurut Moleong (2005:3) adalah "tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis, menurut Arikunto (2002:309), adalah metode yang menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada. Metode ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, karena metode ini mempunyai ciri-ciri memusatkan pada pemecahan masalah yang ada dan aktual, data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara dan teknik yang berasal dari berbagai sumber, baik manusia maupun bukan manusia. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi :

- **Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data/informasi yang utama dalam penelitian naturalistik inkuiri, dengan mengamati kegiatan secara langsung yang dilakukan guru berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar terutama interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, serta untuk mengamati guru dalam menggunakan media pembelajaran dan alat evaluasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui Peranan Pembelajaran Konsep Demokrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Sikap Demokratis Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.

- **Wawancara**

Lincoln dan Guba, (1985:268), mengartikan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, kepedulian, disamping itu dapat mengalami dunia pikiran dan perasaan responden.

Dengan menggunakan teknik wawancara data yang belum jelas berupa ucapan, pikiran, gagasan, perasaan dan tindakan dari guru dan siswa dapat terungkap oleh peneliti secara akurat. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan, siswa dan kepala sekolah. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka sehingga responden mempunyai keleluasaan untuk memberikan jawaban atau penjelasan.

- **Studi Dokumentasi**

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, seperti foto dan berbagai dokumen bahan statistik yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan. Foto mempunyai keuntungan tersendiri yang dapat menangkap, "membekukan" suatu situasi pada detik tertentu dan dengan demikian memberikan bahan deskriptif yang berlaku bagi saat ini (Nasution, 2003:87).

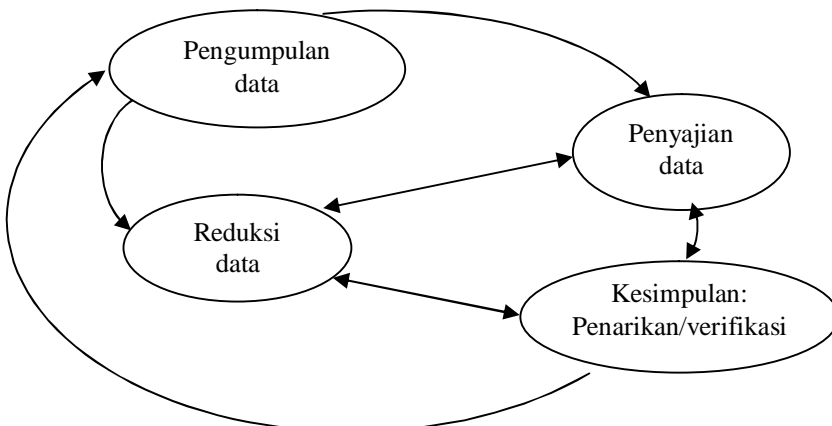
- **Studi Literatur**

Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Selain itu, studi literatur yaitu mempelajari buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik studi literatur yang digunakan adalah mempelajari sejumlah literatur yang berupa buku, jurnal, surat kabar dan sumber-sumber kepustakaan lainnya guna mendapatkan informasi-informasi yang menunjang. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebagai landasan teoritis yang kaitannya dengan permasalahan yaitu Peranan Pembelajaran Konsep Demokrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Sikap Demokratis Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.

3. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Nasution (2003:129) mengemukakan bahwa: tidak ada suatu cara tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi semua penelitian, salah satu cara yang dapat dianjurkan mengikuti langkah-langkah berikut : 1) reduksi data, 2) display data, 3) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.



Bagan 1.1 Komponen-komponen Analisis Data (Miles dan Huberman, 1992:20)

Bagan di atas dapat dijelaskan bahwa tiga jenis kegiatan utama pengumpulan data (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) merupakan proses siklus interaktif.

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, siswa SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.

5. Validitas Data

Penelitian kualitatif sering kali diragukan terutama dalam hal kesahihan datanya (validitas data), oleh sebab itu dibutuhkan cara untuk dapat memenuhi kriteria kredibilitas data, beberapa cara dapat dilakukan untuk mengusahakan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya, dalam penelitian ini cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Memperpanjang Masa Observasi

Dalam proses ini, peneliti mengadakan hubungan baik dengan tutor dan warga belajar. Sedangkan usaha peneliti dalam memperpanjang waktu penelitian guna memperoleh data dan informasi yang sah (valid) dari sumber data adalah dengan meningkatkan intensitas pertemuan dan melakukan penelitian dalam kondisi yang wajar (valid) dimana mencari waktu yang tepat guna berinteraksi dengan sumber data.

b. Pengamatan Terus-Menerus

Agar tingkat validitas data yang diperoleh mencapai tingkat yang tertinggi, peneliti mengadakan pengamatan secara terus-menerus terhadap subjek penelitian, terutama dalam proses peranan pembelajaran konsep demokrasi.

c. Triangulasi Data

Tujuan dari triangulasi data adalah mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan terhadap informasi yang diberikan warga belajar dan tutor tentang fokus penelitian agar memperoleh kebenaran informasi yang diperoleh.

d. Menggunakan Referensi yang Cukup

Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data, peneliti menggunakan bahan dokumentasi yakni hasil rekaman wawancara dengan subjek penelitian, foto-foto dan lainnya yang diambil dengan cara yang tidak mengganggu atau menarik perhatian informan, sehingga informasi yang diperlukan akan diperoleh dengan tingkat kesahihan yang tinggi.

e. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan dari *membercheck* adalah agar informasi yang peneliti peroleh dan gunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara *membercheck* kepada subjek penelitian di akhir kegiatan penelitian lapangan tentang fokus yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembelajaran Konsep Demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa dalam setiap proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dalam mengawali pembelajaran guru sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya mengenai permasalahan atau isu kewarganegaraan. Isu-isu kewarganegaraan yang dimaksud dapat berasal dari lingkungan sekitar siswa, maupun lingkungan secara luas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan suasana yang demokratis kepada siswa. Sebagaimana pendapat Zamroni (Tim ICCE, 2005:7) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu *learning* proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Lebih lanjut, Somantri (2001:154) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Sementara itu, dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dimulai dengan penyampaian berbagai cerita, gambar kliping, artikel, ataupun berita-berita aktual yang problematis diakuinya telah melatih siswa untuk terbiasa berpendapat menanggapi berbagai isu yang menuntut pemecahan.

Menyadari manfaat kegiatan tanya jawab terhadap berbagai cerita, gambar kliping, artikel, ataupun berita-berita aktual yang problematis, guru selalu menerapkan kegiatan itu dalam upaya menumbuhkan keterampilan bersikap demokratis siswa. Dalam penjelasan pasal 39 UU No.20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara

agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Hal senada dikemukakan pula oleh Somantri, (2001:299) antara lain sebagai berikut:

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembelajaran konsep demokrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat tergambarkan pada materi pokok Masyarakat Politik, di mana sebagian besar siswa telah memahami materi tersebut. Begitu pula dalam materi pokok prinsip-prinsip demokrasi, dimana sebagian besar siswa memahami konsep-konsep demokrasi pada materi pokok tersebut. Hal ini terlihat dari besarnya partisipasi para siswa dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Kendala-kendala dalam Pembelajaran Konsep Demokrasi

Guru mengakui keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki siswa berpengaruh terhadap sikap demokratis siswa dalam menyampaikan pendapat yang diajukan. Oleh karena itu guru harus terus menstimulasi siswa dengan mengedepankan sikap demokratis siswa menggunakan.

Selain itu, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini cenderung mengharuskan lebih banyak menggunakan metode ceramah, hal ini bisa saja terjadi apabila sumber pembelajaran yang terbatas serta media pembelajaran yang sangat sederhana. Pada dasarnya, metode ceramah memiliki banyak kelemahan, antara lain sebagai berikut:

Kelemahan metode ceramah, antara lain:

- 1) bisa menimbulkan pembelajaran yang tidak sistematis;
- 2) karena adanya keterbatasan daya dengar manusia, maka dapat menyebabkan pembelajaran yang melelahkan, membosankan dan mengantuk;
- 3) "melanggar" kemampuan daya belajar manusia, karena tidak semua siswa mampu menyimak dan menangkap 'pesan lisan' serta menuliskannya dengan cepat;
- 4) kecepatan dan intonasi suara guru yang tidak teratur menyebabkan hilangnya kesempatan siswa untuk berpikir, bereaksi dan berekspresi (Djahiri, 1985: 36).

Berkaitan dengan beberapa kelemahan yang terdapat dalam metode ceramah tersebut, maka guru perlu menguasai dan menggunakan multivariasi metode dalam kegiatan dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pembelajaran. Menurut Budimansyah (2002: 8) prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif (*student active learning*), kelompok belajar kooperatif (*cooperaitive learning*), pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif

(*reaktive learning*). Prinsip-prinsip dasar pembelajaran ini merupakan karakteristik dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis portofolio.

Dilihat dari penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar, terungkap bahwa guru menggunakan sumber-sumber dan media pembelajaran sudah cukup bervariasi. Menurut Djahiri (1996: 31), penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran memiliki arti penting bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar, sebab dengan adanya media pembelajaran diharapkan dapat berperan untuk:

- a. Menjadi fasilitator proses Kegiatan Belajar Siswa dan peningkatan Hasil Belajar Real.
- b. Meningkatkan kadar proses CBSA atau proses Kegiatan Mengajar Guru interaktif – reaktif.
- c. Meningkatkan motivasi belajar atau suasana belajar yang baik.
- d. Meringankan beban tugas guru tanpa mengurangi kelancaran dan keberhasilan pengajaran.
- e. Meningkatkan proses Kegiatan Belajar Mengajar secara efektif, efisien dan optimal.
- f. Menyegarkan Kegiatan Belajar Mengajar.

Penggunaan media dalam Kegiatan Belajar Mengajar hendaknya memperhatikan kualifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar dan metoda pembelajaran yang akan digunakan.

3. Proses Pembelajaran Konsep Demokrasi dalam Membangun Sikap Demokratis Siswa

Berdasarkan deskripsi penelitian terungkap bahwa, dengan proses pembelajaran konsep demokrasi siswa terlatih untuk terbiasa bersikap secara demokratis dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat maupun isu-isu kewarganegaraan yang terjadi dalam lingkup nasional. Selain itu, respon siswa cukup positif terhadap penyajian isu-isu aktual tersebut. Hal itu terlihat dari keterlibatan siswa dalam menanggapi isu-isu yang disampaikan guru dan munculnya gagasan-gagasan siswa yang dikemukakan dengan sikap demokratis. Hal ini sesuai dengan tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan) sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:2).

Tujuan-tujuan tersebut senada dengan pendapat Djahiri (1996:8) bahwa melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan peserta didik:

- a. Nalar akan konsep dan norma Pancasila dalam berbagai fungsi dan perannya. Pancasila sebagai falsafah idil yuridis konstitusional ideologi negara, etika politik berbangsa dan bernegara serta sebagai pandangan hidup dan jati diri manusia/masyarakat Indonesia dalam berbagai kehidupannya (astagatra kehidupan).
- b. Melek konstitusi (UUD 1945) dan perangkat hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia.
- c. Menghayati dan meyakini tatanan nilai dan moral yang termuat dalam sub a dan sub b.
- d. Mengamalkan dan membudayakan hal tersebut sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.

Sedangkan fungsi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, secara umum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*). Menyadari pentingnya konsep demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, selain dengan menyampaikan isu-isu aktual pada saat mengawali pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, juga dengan menggunakan berbagai model/metode pembelajaran yang merangsang sikap demokratis siswa terhadap berbagai persoalan kehidupan yang terjadi baik di lingkungan sekitar siswa, maupun di lingkungan yang lebih luas. Hal ini tidak terlepas dari tujuan umum pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Somantri (2001:279) adalah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan "warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis..., Pancasilaasejati".

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti dapat menarik beberapa simpulan, antara lain:

1. Dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan guru sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya mengenai permasalahan atau isu kewarganegaraan. Isu-isu kewarganegaraan yang dimaksud dapat berasal dari lingkungan sekitar siswa, maupun lingkungan secara luas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan suasana yang demokratis kepada siswa.
2. Kendala-kendala dalam proses pembelajaran konsep demokrasi adalah keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki siswa berpengaruh

terhadap sikap demokratis siswa dalam menyampaikan pendapat yang diajukan.

3. Dengan proses pembelajaran konsep demokrasi siswa terlatih untuk terbiasa bersikap secara demokratis dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat maupun isu-isu kewarganegaraan yang terjadi dalam lingkup nasional. Selain itu, respon siswa cukup positif terhadap penyajian isu-isu aktual tersebut. Hal itu terlihat dari keterlibatan siswa dalam menanggapi isu-isu yang disampaikan guru dan munculnya gagasan-gagasan siswa yang dikemukakan dengan sikap demokratis.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran-saran sebagai masukan untuk guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa dan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, antara lain :

1. Bagi guru
 - a. Setiap guru diharapkan memberikan multivariasi metode dalam melakukan kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas kepada siswa. Sehingga kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bisa lebih menarik bagi siswa.
 - b. Guru harus terus menstimulasi siswa untuk mengemukakan pendapatnya dengan mengedepankan sikap demokratis siswa, sehingga siswa terbiasa dengan sikap demokratis dalam kehidupannya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
 - c. Guru diupayakan seoptimal mungkin untuk memanfaatkan media yang ada, sehingga pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bisa lebih menarik siswa untuk berperan aktif.
2. Bagi siswa
 - a. Siswa diharapkan agar dapat lebih meningkatkan sikap demokratisnya, dengan mengutamakan sikap menghargai dan menghormati setiap pendapat orang lain.
 - b. Sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh sekolah harus dimanfaatkan secara optimal oleh siswa untuk meningkatkan pengetahuannya, khususnya untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
 - c. Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan kreatif, sehingga kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak menjenuhkan.
 - d. Siswa diharapkan tidak lekas merasa puas dengan nilai yang diperoleh, melainkan terus berusaha meningkatkan pengalaman belajar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

3. Bagi Kepala Sekolah

Adanya peningkatan kualitas serta frekuensi pembinaan dari Kepala Sekolah yang berkesinambungan, baik itu secara kekeluargaan maupun secara kedinasan terhadap guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan, maupun guru lainnya. Sehingga kinerja guru-guru dapat dikontrol dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muchtar, S. 2004. *Pengembangan Berpikir dan Nilai dalam IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Branson, M.S. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LkiS.
- Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio*. Bandung: PT Genesindo.
- Cogan, J John and Raymond Derricott. 1998. *Citizenship Education in 21st Century*. London: Kogan Page.
- Cresswell, J.W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publication.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning (CTL)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pendidikan Lanjutan Pertama.
- _____. 2003. *Kompetensi Standar Mata Pelajaran Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta.
- _____. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang: Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Depdiknas.
- Djahiri, A.K. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung.
- _____. 1996. *Menelusuri Dunia Afektif Pendidikan Nilai dan Moral*, Bandung, Laboratorium PMP IKIP Bandung.
- _____. 2004. *Memahami Makna dan Isi Pesan Pembelajaran dan Portofolio Learning and Evaluation Based*, Bandung: PPs UPI.
- _____. 2007. *Kapita Selektu Pembelajaran; Pembaharuan Paradigma PKN – PIPS – PAI*. Bandung: Lab. PMPKN FPIPS UPI Bandung.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.

- Manan, B. 2001. ***Perkembangan pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan supremasi Hukum.*** Jakarta: PT. Alumni.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. ***Analisis Data Kualitatif.*** Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pers).
- Moleong, Lexy J. 2005. ***Metodologi Penelitian Kualitatif.*** Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rosyada, Dede. 2000. ***Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani.*** Jakarta: Prenada Media.
- Sanusi, A. 1998. ***Membudayakan Pilar-pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia.*** Bandung: Panitia Seminar PPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN-IKIP.
- Nasution, S. 2003. ***Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.*** Bandung: PT Tarsito.
- Somantri, Numan M. 2001. ***Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS.*** Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Wahab, Abdul Azis. 2001. ***Implementasi dan Arah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia.*** Bandung: Civicus Jurnal Ilmu Politik, Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Edisi 1.
- Winataputra, U.S. 1999. ***Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi.*** Bandung: CICED.
- _____. 2001. ***Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi.*** Bandung: PPS UPI (Disertasi).
- _____. 2006. ***Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Bahan Sajian dan Diskusi dalam Penyegaran Dosen dan SUSCADOS PKn.*** Tidak diterbitkan.
- _____. dan Budimansyah, D. 2007. ***Civic Education.*** Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. SPs UPI.
- Zamroni. 2001. ***Pendidikan Untuk Demokrasi, Tantangan Menuju Civil Society.*** Yogyakarta: Biograf Publishing.